



**Media Pengembangan Ilmu dan
Profesi Kegeografian**

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/index>



**KEBUTUHAN RUANG FASILITAS PELAYANAN MEMASUKI
ERA BONUS DEMOGRAFI DI KECAMATAN PURBALINGGA**

Oleh: Shalihati, SF¹; Nirwansyah, AW²

1 Geography Education Department, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

2 Institute of Geography, University of Cologne, Germany

Abstrak

Pemusatan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Purbalingga dengan rata-rata 4.011 jiwa/km² pada Tahun 2015, melonjak drastis dibandingkan pada satu tahun sebelumnya, dimana kepadatan penduduknya pada angka 3.968 jiwa/km². Pertambahan penduduk yang mencapai 631 jiwa dalam kurun waktu satu tahun tersebut, tentunya mengakibatkan komposisi jumlah penduduk terus meningkat dan memberikan efek pada permasalahan akan kebutuhan dan ketersediaan fasilitas pelayanan, diantaranya seperti fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, umum dan pelayanan publik. Adapun jumlah penduduk saat ini dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk pada masa puncak bonus demografi, yang diperkirakan terjadi 15 tahun yang akan datang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan ruang fasilitas pelayanan 15 tahun yang akan datang di Kecamatan Purbalingga. Metode yang digunakan adalah analisis data primer dan sekunder, dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan fasilitas pelayanan pendidikan memasuki 15 tahun yang akan datang masih membutuhkan kebutuhan ruang, sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan, ekonomi, umum dan pelayanan publik belum diperlukan urgensi penambahan kebutuhan ruang, dikarenakan ruang yang ada saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : *Kebutuhan Ruang, Fasilitas Pelayanan, Bonus Demografi*

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era bonus demografi sejak Tahun 2012 lalu, dimana struktur penduduk didominasi oleh usia produktif dibandingkan dengan usia non produktif, ditunjukkan dengan meningkatnya penduduk yang dapat bekerja berjumlah sangat cukup dan jumlah tanggungan yang lebih sedikit, era bonus demografi ini akan diperkirakan mencapai pada puncaknya di Tahun 2035 yang akan datang, dengan jumlah penduduk yang berada di usia produktif lebih besar secara kuantitas tentu sangat menguntungkan sebagai modal pembangunan nasional (Menteri Komunikasi dan Informatika, 2014). Bonus Demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi (Konadi, Win dan Zainuddin Iba, 2011).

Bonus demografi memberikan implikasi pula pada perencanaan pembangunan disuatu wilayah, dikarenakan pemahaman mengenai kondisi penduduk memegang peranan sangat penting untuk terjadinya pemerataan pembangunan, dengan ketersediaan data kependudukan yang terpercaya seperti struktur, laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin akan memudahkan para perumus pembangunan menentukan rencana strategi seperti perencanaan dalam penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, permukiman dan lingkungan yang nantinya diperlukan bagi penduduknya (Heryanah, 2015).

Salah satu permasalahan kependudukan yang memerlukan penanganan perencanaan pembangunan terjadi di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang terletak di bagian selatan dari Gunung Api Slamet ini menjadi wilayah dengan pemusatan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Purbalingga dengan rata-rata 4.920 jiwa/km² pada Tahun 2015, dengan jumlah penduduk 59.042 jiwa, yang terdiri dari 28.715 laki-laki dan 30.327 perempuan, dimana pada tahun sebelumnya kepadatan penduduk pada angka 3.968 jiwa/km², ini menjadi bukti bahwa dalam satu tahun terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 631 jiwa yang semakin memadati wilayah Kecamatan Purbalingga yang hanya memiliki luas wilayah 1.473,10 Hektar, luas tersebut merupakan paling kecil diantara 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Adapun pertumbuhan penduduk yang terekam pada sumber data yang sama, menyebutkan bahwa di Kecamatan Purbalingga selama satu tahun terakhir mengalami pertumbuhan penduduk di angka 1,08 lebih rendah dari satu tahun sebelumnya namun lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, yang hanya menyentuh angka 0,18 (Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2016).

Komposisi jumlah penduduk di Kecamatan Purbalingga yang terus menerus meningkat, tentu memberikan efek pada permasalahan akan perencanaan dan penyediaan fasilitas pelayanan, seperti menurut Muta'ali (2015) bahwa penduduk yang tinggal disuatu wilayah, dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya

membutuhkan dukungan fasilitas pelayanan, dan secara umum fasilitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fasilitas umum, sosial dan ekonomi, adapun fasilitas pertama sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah dan umumnya tersedia disemua tempat, sedangkan fasilitas ketiga umumnya menganut kebutuhan pasar, sedangkan mengetahui ketersediaan dan daya layan suatu fasilitas pelayanan sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan akan memberikan gambaran realitas pencapaian pelayanan publik dan evaluasi dari suatu fasilitas, sehingga dapat diperoleh penyusunan langkah-langkah prioritas dalam penyediaan fasilitas tersebut.

Seperti halnya pada perencanaan pembangunan Kota Bagdad masa Khalifah Al Mansur (762 M) diawali dari menghitung jumlah penduduk dari kota tersebut, setelah itu dibuat estimasi jumlah penduduk berikutnya, lalu kemudian dibangun fasilitas yang dibutuhkan penduduk seperti masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, begitu pula pemakanan umum dan tempat pengolahan sampah. Semua fasilitas ini berada dalam satu wilayah yang dapat dijangkau dengan perjalanan kaki dan dengan kualitas yang standar, sehingga penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekerja dan menuntut ilmu mereka tidak perlu menempuh perjalanan jauh, tentunya di sisi lain meniadakan permasalahan macet dan mengurangi masalah pencemaran udara (Srjan, 2013).

Ketersediaan fasilitas pelayanan di Kecamatan Purbalingga saat ini tentu berbeda dengan kebutuhan di era bonus demografi yang diperkirakan terjadi puncaknya pada 15 tahun yang akan datang, baik secara kuantitas maupun luasan ruang yang akan digunakan untuk kegiatan fasilitas pelayanan. Perencanaan awal yang baik terhadap kebutuhan ruang fasilitas untuk masa yang akan datang tentunya akan meminimalkan persoalan pembangunan yang dimungkinkan akan hadir dalam pengelolaan wilayah.

2. METODE

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara dari kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Bojongsari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kemangkong, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Bukateja, serta disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan ini terbagi menjadi 11 Kelurahan dan 2 Desa, dengan luas keseluruhan wilayah 1.473,10 Hektar, dengan luas terbesar adalah Desa Jatisaba 205 Hektar dan kelurahan terkecil adalah Purbalingga Kulon dengan luas 52 Hektar. Dominasi penggunaan lahan di Kecamatan Purbalingga adalah Bangunan/Pekarangan dengan luas 594,28 Hektar, disusul penggunaan lahan sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi teknis, tegalan/kebun, sawah irigasi sederhana, sawah tadah hujan, kolam, hutan negara dan lain-lain

(Kecamatan Purbalingga Dalam Angka 2016).

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menjabarkan secara kualitatif data persebaran fasilitas pelayanan saat ini, data luasan ruang pengembangan fasilitas pelayanan yang diatur oleh RTRW, data implikasi kebutuhan ruang fasilitas pelayanan untuk 15 tahun yang akan datang di Kecamatan Purbalingga, fasilitas pelayanan yang diteliti meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, umum dan pelayanan publik

Data primer penelitian ini adalah data persebaran fasilitas pelayanan saat ini di Kecamatan Purbalingga yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Sedangkan tahap pengambilan data fasilitas pelayanan diawali dengan observasi seluruh populasi fasilitas pelayanan yang ada di Kecamatan Purbalingga, pengambilan data koordinat dengan menggunakan GPS kemudian dilakukan pencatatan nama fasilitas, pengelompokan jenis fasilitas dan pengambilan dokumentasi berupa foto, hasil observasi tersebut diolah dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada software 9.3 untuk dihasilkan peta persebaran fasilitas pelayanan.

Sedangkan data luasan ruang pengembangan fasilitas pelayanan yang diatur oleh RTRW dapat diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomer 5 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031.

Adapun data implikasi kebutuhan ruang fasilitas pelayanan untuk 15 tahun yang akan datang di Kecamatan Purbalingga dapat dihitung dengan beberapa langkah perhitungan yang tercantum dalam buku Muta'ali (2015) yang berjudul Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah. Langkah tersebut diawali dari menghitung terlebih dahulu: 1) Proyeksi Penduduk, dengan menggunakan rumus berikut:

$$P_n : P_o (1+r)^t$$

Keterangan:

- P_n : Penduduk pada tahun n
- P_o : Penduduk pada tahun awal
- 1 : Angka konstanta
- r : Angka pertumbuhan penduduk (dalam persen)
- t : Jumlah rentang tahun dari awal hingga tahun n

Kemudian setelah menentukan proyeksi penduduk, hasil hitungannya dapat digunakan untuk menghitung 2) Proyeksi Kebutuhan Ruang Fasilitas Pelayanan, dengan menggunakan rumus:

$$D_{i-t(n)} : JPt(n) / Thi$$

Dimana

$$JPt(n) : P_n / Thi$$

Keterangan:

- $D_{i-t(n)}$: Kebutuhan fasilitas i pada tahun ke- n (proyeksi)
- $JPt(n)$: Jumlah Penduduk hasil proyeksi pada tahun ke- n
- P_n : Proyeksi penduduk dengan metode pertumbuhan geometri
- Thi : Ambang batas fasilitas i

Tambahan kebutuhan ruang untuk fasilitas i pada tahun ke-n (JFT) diperoleh dari:

JTF : Di-t(n) – Si (Ketersediaan fasilitas pelayanan saat ini)

Setelah diperoleh proyeksi kebutuhan fasilitas pelayanan baru kemudian dapat ditentukan 3) Implikasi Kebutuhan Ruang Fasilitas Pelayanan untuk masa 15 Tahun Mendatang, dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$Dri : STDr \times JTF$$

Keterangan:

Dri : Kebutuhan Ruang untuk Fasilitas i

STDr : Standar kebutuhan ruang minimal untuk fasilitas i

Untuk standar kebutuhan ruang minimal untuk fasilitas pelayanan itu sendiri telah diatur dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Permukiman di Perkotaan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Ambang Batas Penduduk Dan Standar Kebutuhan Ruang Minimal Pada Fasilitas Pelayanan Dalam SNI 03-1733-2004

No.	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Ambang Batas Penduduk Pendukung (Jiwa)	Standar Kebutuhan Ruang Minimal (m ²)
A.	PENDIDIKAN		
1.	TK	1.250	1.200
2.	SD	1.600	1.500
3.	SMP	4.800	10.000
4.	SMA	4.800	20.000
B.	KESEHATAN		
1.	Posyandu	1.250	
2.	Balai Pengobatan	2.500	300
3.	Klinik Bersalin	30.000	1.600
4.	Puskesmas Pembantu	30.000	500
5.	Puskesmas	120.000	650
6.	Rumah Sakit	240.000	86.400
7.	Tempat Praktik Dokter	5.000	-
8.	Apotik	30.000	350
C.	EKONOMI		
1.	Toko/Warung	250	100
2.	Pertokoan	6.000	1.200
3.	Pusat Pertokoan/Pasar Kecil Lingkungan	30.000	13.500
4.	Pusat Niaga (Toko, Pasar, Bank, Kantor, Industri)	120.000	36.000
5.	Shopping Center	340.000	96.000
D.	UMUM		
1.	Gedung Serbaguna	120.000	3.000
2.	Gedung Bioskop	120.000	2.000
3.	Masjid Lokal	2.500	600
4.	Masjid Kelurahan	30.000	3.600
5.	Masjid Kecamatan	120.000	5.400
6.	Taman Tempat Bermain dan Lapangan Olah Raga	480.000	-

E.	PELAYANAN PUBLIK		
1.	Kantor Kelurahan	30.000	1.000
2.	Kantor Kecamatan	120.000	25.000
3.	Kantor Polisi/Koramil	120.000	1.000
4.	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	120.000	1.000

Sumber: Muta'ali (2015)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

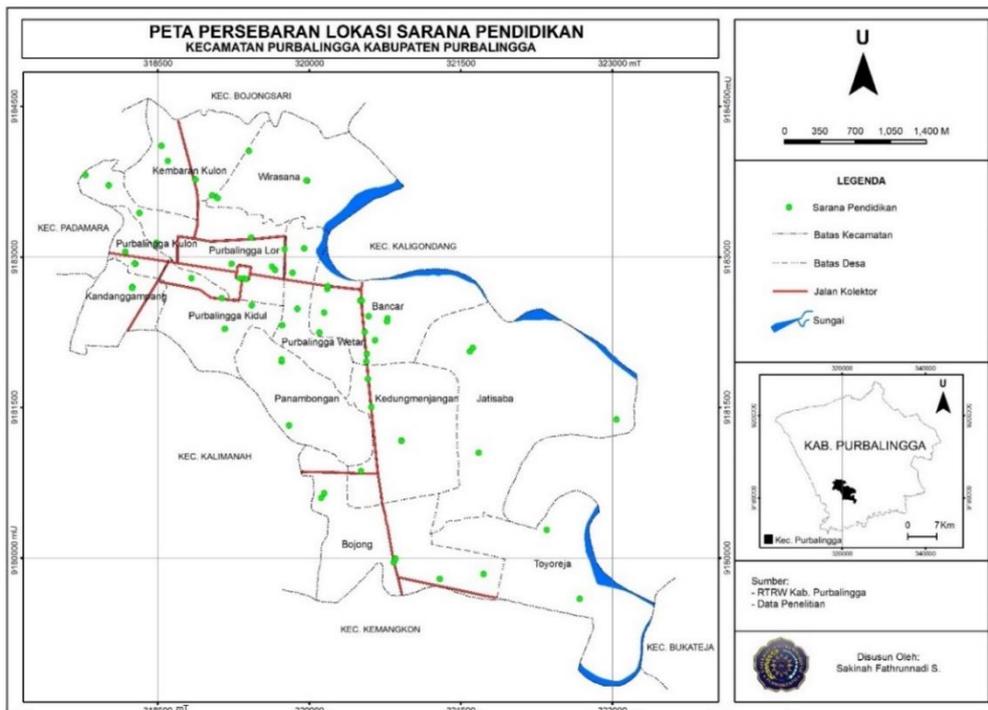
3.1. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan

Fasilitas pelayanan yang pertama tersedia di Kecamatan Purbalingga adalah Fasilitas Pelayanan Pendidikan, merupakan fasilitas dasar yang wajib hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan Pendidikan, mulai dari pendidikan pada tingkat anak usia dini hingga Pendidikan tingkat menengah ataupun perguruan tinggi.

Kecamatan Purbalingga setelah dilakukan observasi di temukan persebaran Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)/ sederajat seperti Roudotul Athfal dan Bushanul Athfal, Sekolah

Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tasanawiyah dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah.hingga Pendidikan tingkat menengah ataupun perguruan tinggi.

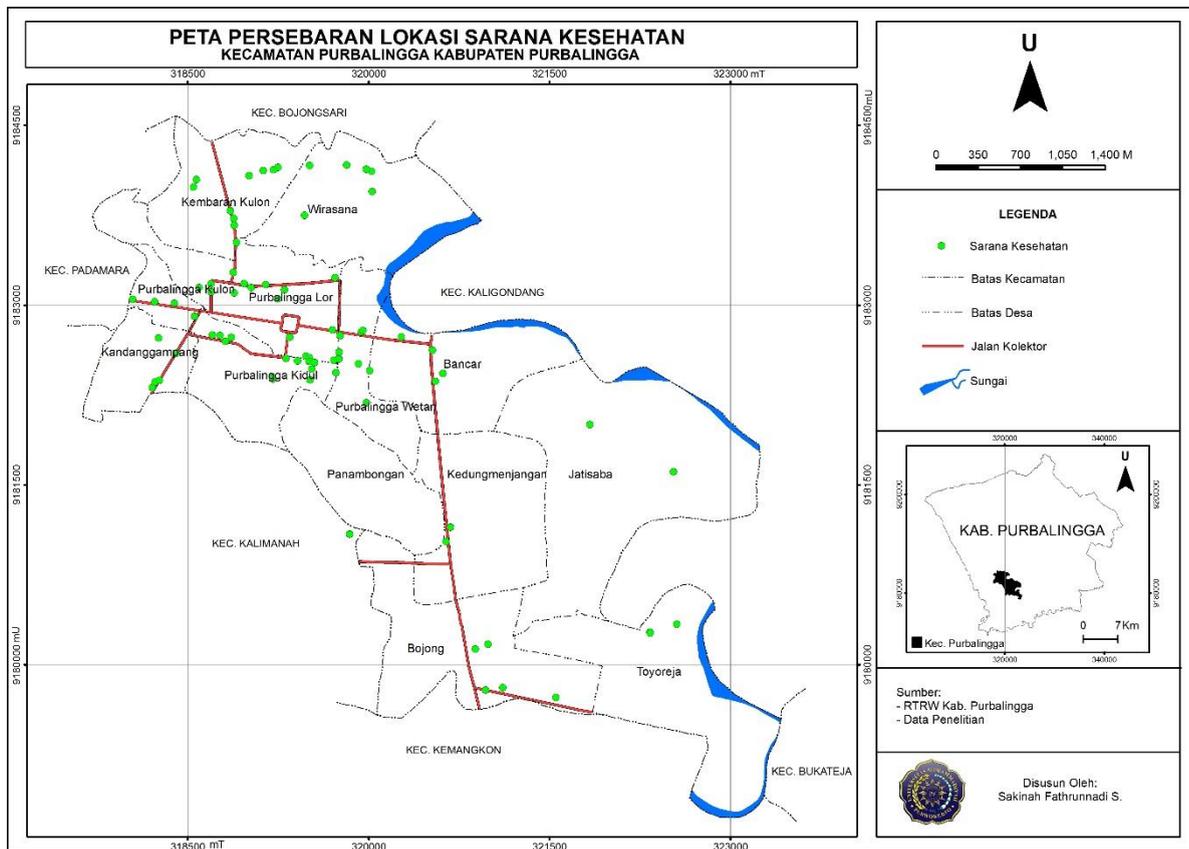
Fasilitas Pendidikan untuk jenjang TK di Kecamatan Purbalingga terdapat 21 titik lokasi, Sekolah Dasar/Sederajat 31 titik lokasi, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat 10 titik lokasi dan untuk Sekolah Menengah Atas 8 titik lokasi.



Gambar 1. Peta Persebaran Fasilitas Pelayanan Pendidikan (Sumber: Observasi, 2017)

Fasilitas kedua yang tersedia di Kecamatan Purbalingga adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan, merupakan suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016.

rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, seperti halnya menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Fasilitas Kesehatan yang ada di Kecamatan Purbalingga tersebar pada jenis; Posyandu terdapat 8 titik lokasi, Balai Pengobatan 21 titik lokasi, Klinik Bersalin 11 titik lokasi, Puskesmas Pembantu 1 titik lokasi, Puskesmas 2 titik lokasi, Rumah Sakit 4 titik lokasi, Tempat Praktik Dokter 13 titik lokasi dan Apotek terdapat 22 titik lokasi.



Gambar 2. Peta Persebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Sumber: Observasi, 2017)

Fasilitas ketiga adalah Fasilitas Pelayanan Ekonomi, merupakan fasilitas pendukung kegiatan aktivitas ekonomi, untuk jumlah fasilitas pelayanan ekonomi yang ada di Kecamatan Purbalingga terdiri dari; Warung sejumlah 322 titik lokasi, Pertokoan 13 titik lokasi yang tersebar di sekitar alun-alun purbalingga, Pusat Pertokoan/Pasar Kecil Lingkungan 4 titik lokasi, dan Pusat Niaga (Toko, Pasar, Bank, Kantor, Industri) terdapat 1 titik lokasi di area Pasar Segamas dan sekitarnya, sedangkan untuk *Shopping Center* di Kecamatan Purbalingga belum memiliki, untuk Fasilitas Ekonomi di kecamatan ini nampak mendominasi dibandingkan dengan fasilitas yang lainnya, hal ini semakin membuktikan bahwa Kecamatan ini menuju pada perkembangan menjadi Pusat Kota dari Kabupaten Purbalingga.

Adapun fasilitas keempat, merupakan Fasilitas Pelayanan Umum, yaitu suatu fasilitas yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Jumlah fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Purbalingga adalah Gedung Serbaguna sejumlah 7 titik lokasi, Gedung Bioskop tidak didapati di kecamatan ini, Masjid Lokal sebanyak 41 titik lokasi, Masjid Kelurahan 11 titik lokasi, Masjid Kecamatan 1 titik lokasi, serta Taman Tempat Bermain dan Lapangan Olah Raga 16 titik lokasi.

Fasilitas Pelayanan Publik, merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah fasilitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan Purbalingga adalah; Kantor Kelurahan sebanyak 13 titik lokasi, Kantor Kecamatan 1 titik lokasi, Kantor Polisi/Koramil 3 titik lokasi, dan Tempat Pembuangan Sampah Sementara 3 titik lokasi



Gambar 3. Contoh Fasilitas Pelayanan Ekonomi Jenis Industri



Gambar 4. Contoh Fasilitas Pelayanan Umum Jenis Masjid



Gambar 5. Contoh Fasilitas Pelayanan Pelayanan Publik jenis Kantor Kelurahan (Sumber: Dokumentasi Lapangan, 2017)

3.2. Luas Ruang Fasilitas Pelayanan di Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 menyatakan bahwa di Kecamatan Purbalingga memiliki luas wilayah 1.473,10 wajib memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan ketentuan 30% dari luas wilayah tersebut. Artinya Kecamatan Purbalingga memiliki 441,93 Hektar yang dikhususkan untuk RTH. Sedangkan dalam Pasal 89 Ayat 3 RTRW Kabupaten Purbalingga, RTH merupakan kawasan lindung yang diatur dengan ketentuan umum yaitu:

1. tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung yang dapat merubah fungsi lindung;
2. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan; dan
3. diperbolehkan alih fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan

Maka jelas untuk pengembangan luas ruang fasilitas pelayanan di Kecamatan Purbalingga untuk 15 tahun yang akan datang tidak diperbolehkan mengambil dari luasan RTH yang telah ditetapkan, sehingga ruang yang dapat dimanfaatkan dimasa yang akan datang adalah sisa dari luas wilayah Kecamatan Purbalingga yang dikurangi dengan luasan RTH Kecamatan Purbalingga, yaitu hasilnya terdapat sisa luas 957,515 Hektar, sisa luas ini disebut juga sebagai

ruang eksisting, yang didalamnya dapat digunakan untuk pemanfaatan kebutuhan sosial dan ekonomi atau yang bersifat budidaya.

3.3. Kebutuhan Ruang Minimal untuk 15 Tahun

Kebutuhan ruang minimal fasilitas pelayanan di Kecamatan Purbalingga, untuk proyeksi penduduk 15 tahun yang akan datang di Kecamatan Purbalingga seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk fasilitas pelayanan pendidikan dimasa yang akan datang masih membutuhkan ruang dengan total kebutuhan ruang 218.800 m² atau 21,88 Hektar, sedangkan kebutuhan ruang untuk fasilitas pelayanan kesehatan, ekonomi, umum dan pelayanan publik, 15 tahun yang akan datang masih tercukupi dengan ruang yang telah digunakan saat ini, tidak menjadi sebuah keperluan yang mendesak untuk membangun lebih banyak lagi ke empat fasilitas pelayanan tersebut.

Sedangkan dikaitkan dengan ruang eksisting di Kecamatan Purbalingga, maka kebutuhan ruang fasilitas pelayanan untuk 15 tahun yang akan datang sebagai salah satu bagian kebutuhan sosial dan ekonomi perlu diatur keberadaannya secara lebih detail bersama dengan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya, seperti besaran lahan untuk permukiman, agar dapat berjalan dengan selaras dan berkelanjutan.

Tabel 2. Prediksi Kebutuhan Ruang Minimal Fasilitas Pelayanan di Kecamatan Purbalingga

No.	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	JP	PP	Proyeksi Penduduk 15 tahun akan datang	Threshold	Proyeksi Kebutuhan	Ketersediaan	JTF	Standar Kebutuhan Ruang Minimal (m ²)	Kebutuhan Ruang (m ²)
A.	PENDIDIKAN									
1.	TK	59,042	1,08	69,365	1,250	55	21	34	1,200	40,800
2.	SD	59,042	1,08	69,365	1,600	43	31	12	1,500	18,000
3.	SMP/MTS	59,042	1,08	69,365	4,800	14	10	4	10,000	40,000
4.	SMA/MA/SMK	59,042	1,08	69,365	4,800	14	8	6	20,000	120,000
B.	KESEHATAN									
1.	Posyandu	59,042	1,08	69,365	1,250	55	8	47	0	0
2.	Balai Pengobatan	59,042	1,08	69,365	2,500	28	21	7	300	2,100
3.	Klinik Bersalin	59,042	1,08	69,365	30,000	2	11	-9	1,600	-14,400
4.	Puskesmas Pembantu	59,042	1,08	69,365	30,000	2	1	1	500	500
5.	Puskesmas	59,042	1,08	69,365	120,000	1	2	-1	650	-650
6.	Rumah Sakit	59,042	1,08	69,365	240,000	0	4	-4	86,400	-345,600
7.	Tempat Praktik Dokter	59,042	1,08	69,365	5,000	14	13	1	0	0
8.	Apotik	59,042	1,08	69,365	30,000	2	22	-20	350	-7,000
C.	EKONOMI									
1.	Toko/Warung	59,042	1,08	69,365	250	277	322	-45	100	-4,500
2.	Pertokoan	59,042	1,08	69,365	6,000	12	12	-1	1,200	-1,200
3.	Pusat Pertokoan/Pasar Kecil Lingkungan	59,042	1,08	69,365	30,000	2	4	-2	13,500	-27,000
4.	Pusat Niaga (Toko, Pasar, Bank, Kantor, Industri)	59,042	1,08	69,365	120,000	1	1	0	36,000	0
5.	Shopping Center	59,042	1,08	69,365	340,000	0	0	0	96,000	0
D.	UMUM									
1.	Gedung Serbaguna	59,042	1,08	69,365	120,000	1	7	-6	3,000	-18,000
2.	Gedung Bioskop	59,042	1,08	69,365	120,000	1	0	1	2,000	2,000
3.	Masjid Lokal	59,042	1,08	69,365	2,500	28	41	-13	600	-7,800
4.	Masjid Kelurahan	59,042	1,08	69,365	30,000	2	11	-9	3,600	-32,400
5.	Masjid Kecamatan	59,042	1,08	69,365	120,000	1	1	0	5,400	0
6.	Taman Tempat Bermain dan Lapangan Olah Raga	59,042	1,08	69,365	480,000	0	16	-16	0	0
E.	PELAYANAN PUBLIK									
1.	Kantor Kelurahan	59,042	1,08	69,365	30,000	2	13	-11	1,000	-11,000
2.	Kantor Kecamatan	59,042	1,08	69,365	120,000	1	1	0	25,000	0
3.	Kantor Polisi/Koramil	59,042	1,08	69,365	120,000	1	3	-2	1,000	-2,000
4.	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	59,042	1,08	69,365	120,000	1	3	-2	1,000	-2,000

Sumber: Olah Data Observasi, 2017

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan ruang fasilitas pelayanan menyongsong bonus demografi di Kecamatan Purbalingga untuk 15 tahun yang akan datang menunjukkan hasil fasilitas pelayanan pendidikan masih membutuhkan kebutuhan ruang, sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan, ekonomi, umum dan pelayanan publik belum diperlukan *urgensi* penambahan kebutuhan ruang karena yang ada saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan 15 tahun yang akan datang.

Saran setelah diadakannya penelitian ini, menjadi penting untuk segera dibuat Rencana Detail Tata Ruang khususnya untuk Kecamatan Purbalingga, yang bersumber dari turunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga, mengingat kecamatan ini menjadi pusat aktivitas di Kabupaten Purbalingga, agar perencanaan pembangunan yang ada saat ini menjadi lebih terencana dan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya hasil pemikiran dalam penelitian ini tidak terlepas bantuan dana dari DIPA Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, ijin dari lembaga Universitas Muhammadiyah Purwokerto, kemudian bantuan informasi data dari Bapak Budi dan Ibu Tutut Gustama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, serta dukungan tenaga observasi yang telah dilakukan oleh ketiga mahasiswa dari Pendidikan Geografi FKIP Universitas

Muhammadiyah Purwokerto yaitu Agung Pri Aji, M Wahyu Pratama dan Agus Setiawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016 *Kecamatan Purbalingga dalam Angka 2016*. Kabupaten Purbalingga.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Publikasi*. ISBN: 978-979-064-606-3.
- Heryanah. 2015. Ageing Population dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. *Jurnal Populasi*. Volume 23 Nomor 3. Halaman 1-16. Universitas Gadjah Mada: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Ikatan Peneliti Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia (IPKKBI). 2011. *Profil Kependudukan Jawa Tengah Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*. <http://ipkkbi.blogspot.com/2011/10/profil-kependudukan-jawa-tengah.html>. diakses 15 Juni 2015.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2014. *Siapa Mau Bonus? Peluang Demografi Indonesia*. Jakarta: Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Direktorat Pengelolaan dan Penyediaan Informasi.
- Konadi, Win dan Zainuddin Iba. 2011. Bonus Demografi Modal Membangun Bangsa yang Sehat dan Bermartabat. *Majalah*

- Ilmiah Unimus*. ISSN: 2085.
Volume 2 Nomor 6.
- Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Jogjakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomer 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031
- Shalihati, Sakinah F dan Anang WN. 2015. Analisis Persebaran Dan Radius Keruangan Pencapaian Maksimal Fasilitas Sekolah Dasar Kecamatan Bukateja. *Laporan Akhir Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Srjna, Aloj. 2013. Persiapan Fasilitas Menyambut Bonus Demografi Indonesia. *Artikel*. <http://reubencherry.com/persi-apan-fasilitas-menyambut-bonus-demografi-indonesia/>. Diakses 29 Mei 2016.
- Sutomo dan Shalihati, Sakinah F. 2015. Analisis Infrastruktur Unggulan Dalam Perkembangan Wilayah Kecamatan Purbalingga. *Laporan Akhir Penelitian*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.